

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



**KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja perangkat daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Kecamatan Bonang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak.

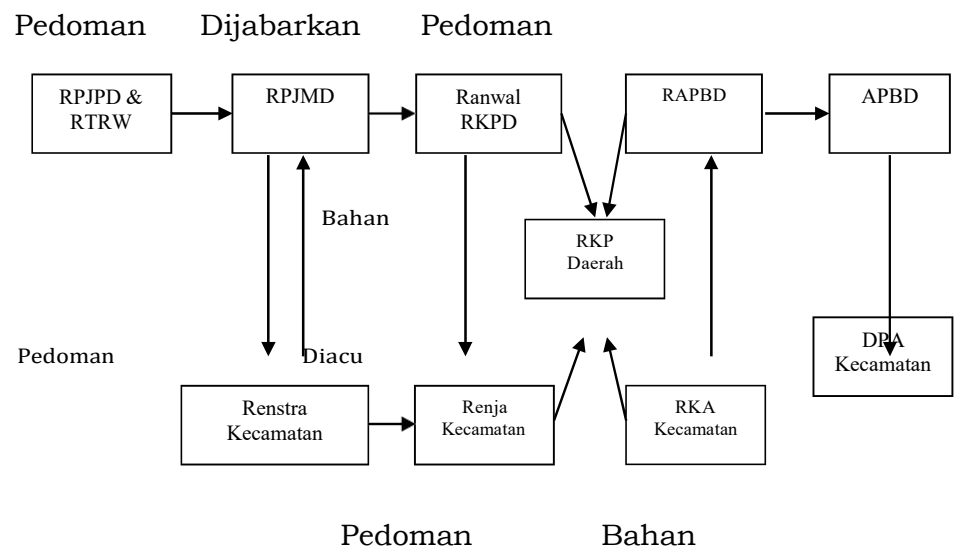
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah

merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja yang disusun oleh Perangkat Daerah tersebut dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Kemudian Kecamatan Bonang menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 yang dapat berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Bonang Tahun 2021- 2026.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Demak sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Kecamatan Bonang berisi program dan kegiatan,

indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja berjalan terkait sisa anggaran pada semester II yang akan digeser pada kegiatan / sub kegiatan lainnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja, Renstra Kecamatan, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

28. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bonang dalam penyusunan RKA Kecamatan Bonang Tahun 2024 sekaligus memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan
3. Kecamatan Bonang Tahun 2024 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Demak Tahun 2024;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Bonang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonang
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bonang
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BONANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bonang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bonang

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2024 Kecamatan Bonang melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik dan terealisasi sebesar 49,75 %. Sedangkan untuk Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2024 dapat diproyeksikan akan juga terealisasi 100%.

Prakiraan tingkat capaian kinerja program/kegiatan baik rutin maupun penunjang menunjukkan akan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Demak. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 adalah rata-rata 100%.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan akhir Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bonang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bonang ini telah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bonang selama tahun berjalan 2024 sampai dengan triwulan II

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai dengan triwulan II di Kecamatan Bonang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Bahwa pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang dalam pelaksanaan Renja sampai trwiluan II adalah tidak ada untuk Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluarannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan di dalam Renja tersebut.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Bahwa Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang ini dalam pelaksanaan Renja sampai trwiluan II untuk Program/Kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan .

Bahwa Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2024 sampai triwulan II, pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak ditemukan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang

Bahwa Implikasi ini merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra akan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Bonang pada umumnya

- b. Terhadap program yang realisasinya belum dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan Renstra akan berdampak pada penyampaian dari laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bonang ini.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara para Kasi yang melaksanakan kegiatan dengan Kasubbag program dan keuangan dalam merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan tingkat capaian strategis dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Bonang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	49,50%	49,50%	100%	100%	100%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9	5	45%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	30%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	50%	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	100%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	50,00%	50,00%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 persen	100%	70%	70%	100 persen	100 Persen	100%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	18 Paket	18 Paket	0	0%	18 Paket	22 Paket	100%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	22 Orang	68 Orang	100%
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	2682 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	70 Orang	42 Orang	100%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	53,83%	53,83%	100 Persen	100 Persen	100%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	4 Paket	50,00%	8 Paket	8 Paket	100%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	49 Paket	12 Paket	6 Paket	50,00%	12 Paket	49 Paket	100%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	14 Paket	12 Paket	6 Paket	50,00%	12 Paket	5 Paket	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang dan cetakan dan penggandaan yang disediakan	22000 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50,00%	12 Paket	22000 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Paket	6 Paket	50,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1527 Laporan	1527 Laporan	1527 Laporan	850 Laporan	55,66%	1527 Laporan	1527 Laporan	100%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	18 Unit	16 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	16 Unit	18 Unit	100%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0	0	0%	0 Unit	2 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74 Unit	2 Unit	0	0	0%	0 Unit	74 Unit	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan yang tersedia	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75,00%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	39 Unit	39 Unit	39 Unit	23 Unit	58,22%	80 Unit	142 Unit	100%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	50%	1 unit	1 Unit	100%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	7 Unit	7 unit	4 unit	50%	7 Unit	8 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					Lapangan									
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 unit	0	0%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	24 Unit	24 unit	12 unit	50%	24 Unit	25 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0	0	0%	0 Unit	1 Unit	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 unit	3 unit	54,55%	2 Unit	2 Unit	100%
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100%	100 Persen	100 Persen	50%	50%	100 Persen	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	0 Laporan	0%	8 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	0 Laporan	0%	8 Laporan	8 Laporan	100%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Pelimpahan Urusan Pemerintah Pelayanan Perizinan yang dilakssanakan Camat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	100%	100 Persen	100 Persen	50%	50%	100 Persen	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	100%	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	100%	100 Persen	100 Persen	50,00%	50,00%	100 Persen	100%	100%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50,00%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	12 Laporan	55%	21 Laporan	21 Laporan	100%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	3 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100 Persen	100 Persen	0%	0%	100 Persen	100%	100%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	70 Orang	70 Orang	0 Orang	0%	70 Orang	70 Orang	100%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, Keuangan dan aset pemerintahan Desa	100%	100 Persen	100 Persen	30%	30%	100 Persen	100%	100%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	30%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja Tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s/d Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tingkat Capaian Renstra s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bonang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bonang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Bonang dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Bonang disajikan pada tabel berikut dengan format Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak

No	Idikator	IKU	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 Triwulan II	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	7	8	8	10	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Kecamatan Karangtengah	√	-	-	77	78	79	74,16	n/a	75,16	76,16	Nilai SAKIP 2024 dari Inspektorat belum keluar
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Karangtengah yang mencapai target	√	-	-	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	belum Tercapai
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	√	-	-	90	91	92	90,06	90,41	91	92	belum Tercapai
4	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sudah Tercapai

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah

Terkait evaluasi program prioritas tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat disimpulkan untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro' sebanyak 1 kegiatan, telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2024. Sedangkan sisa 1 kegiatan FKUU rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 dengan capaian kinerja sampai saat ini adalah 50 %, sementara serapan anggaran sampai saat ini yaitu sebesar Rp. 40.265.050,- (53,69 % dari pagu anggaran yang dilaksanakan). Sedangkan untuk kegiatan pelatihan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro telah dilaksanakan berupa kegiatan pelatihan aplikasi shopee dan e-Katalog dengan tema "UMKM Go Online". Realisasi program tercapai 100% dengan serapan anggaran Rp. 49.301.600,- (98,60 % dari pagu yang ditetapkan).

Tabel 2.3

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024

No	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2023	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Proyeksi Realisasi s.d Triwulan IV 2024	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(8/6)*100$	$15=(9/7)*100$		16
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	75.000.000	1	40.265.050	50%	53,69%	2	7.01.04.201.02
2	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	60	65	50.000.000	65	49.301.600	100%	98,60%	65	7.01.03.201.02

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan secara umum belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kecamatan Bonang dihadapkan pada beberapa masalah berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
2. Potensi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan belum terkelola secara optimal
3. Pembangunan infrastruktur lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata
4. Potensi konflik sosial, bencana alam dan non alam yang dihadapi masyarakat
5. Tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang belum merata

Kecamatan Bonang mencatatkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang lebih terinci sebagaimana berikut :

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Banjir dan Rob	Meluapnya air sungai yang tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi, tidak adanya normalisasi sungai secara berkala, minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Naiknya permukaan air laut dan turunnya permukaan tanah di kawasan pesisir
2	Gagal panen hasil pertanian	Masuknya air asin ke wilayah pertanian produktif dan musim yang tidak menentu
3	Pengelolaan Sampah	Kurangnya kesadaran dan kreativitas masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4	Infrastruktur Jalan	Sumber anggaran yang belum merata serta tantangan kondisi geografis yang berbeda-beda
5	Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi	Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat yang belum merata
6	Stunting	Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya gizi anak dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
7	Kemiskinan Ekstrem	Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga masih banyaknya permasalahan sosial yang timbul di masyarakat
8	Anak Tidak Sekolah	Orientasi pendidikan dan tingkat pendapatan yang berbeda-beda dimasyarakat
9	Belum semua usaha kecil/mikro memiliki ijin usaha	Kurangnya pemahaman pemilik usaha akan pentingnya izin usaha dan tata cara pengajuan izin usaha
10	Terdapat produk-produk lokal yang belum terpasarkan dengan baik	Kurangnya sarana promosi dan kreativitas pengelola / pelaku usaha untuk produk-produk lokal
11	Pemilihan Serentak (Kepala Daerah)	Masih terdapatnya sikap apatis dari sebaian masyarakat dalam pemilihan serentak, disisi lain masih mudahnya masyarakat dipecah belah dengan isu yang belum jelas kebenarannya.
12	Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 Tahun	Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
13	Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban Desa yang kurang berkualitas	SDM aparatus desa belum sepenuhnya berkualitas serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan
14	Aparatur Pemerintahan Desa yang belum dapat melaksanakan tupoksinya secara optimal	Kualitas sumber daya manusia dan tingkat Pendidikan yang berbeda-beda, kurang terampilnya Aparatur pemerintahan desa dalam memanfaatkan teknologi serta kurangnya pemahaman terkait regulasi yang mengatur desa
15	Masih ada lembaga desa yang belum berfungsi secara optimal	Lembaga desa belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi dan kewajiban dan kurangnya tingkat pemberdayaan lembaga desa

Beberapa isu strategis terkait permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan antar lain :

1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para stakeholders

- terkait penanganan banjir dan rob
2. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan sampah
 3. Pembangunan infrastruktur sesuai urutan prioritas
 4. Penanganan stunting dengan instansi terkait
 5. Berkoordinasi dengan stakeholders terkait penanganan anak tidak sekolah
 6. Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya
 7. Membuka forum komunikasi antara unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi konflik sosial
 8. Bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Bonang diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2024. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Demak.

Masukan atau bahan musrenbang berasal dari:

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras

dengan skala prioritas daerah.

- b. Masukan dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten Demak.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Keluaran yang dihasilkan proses Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbangcam dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tersebut dengan dilampiri :
 - ✓ Daftar Hadir peserta Musrenbangcam
 - ✓ Daftar usulan prioritas program, kegiatan dan anggaran kecamatan untuk bahan penyusunan rancangan renja Pemerintah Daerah
 - ✓ Daftar program dan kegiatan yang belum disepakati dalam Musrenbangcam.
- b. Penetapan delegasi peserta yang dipilih untuk mewakili kecamatan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten sebanyak 5 orang, terdiri dari delegasi kecamatan 1 orang dan delegasi dari desa 3 orang dan 1 keterwakilan perempuan.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat yang terserap dalam Musrenbangcam di Kecamatan Bonang Tahun 2024 tersaji di tabel berikut 2.5 ini :

Tabel 2.5
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

	RENJA 2024				Perubahan RENJA 2024					Catatan
No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Pekerjaan / Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				NIHIL						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan- kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Dalam RPJMN 2019 – 2024 ada 7 agenda pembangunan yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga masih menjadi prioritas Pemerintah. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 telah mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 terdapat tiga strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem. yaitu : pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.

Tema pembangunan Pemerintah kabupaten Demak pada tahun 2024 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. Arah kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui upaya-upaya penciptaan sentra-sentra ekonomi rakyat dan promosi komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara regional dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Demak. Potensi lokal yang dimaksud adalah lapangan usaha yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan sektor lain yang berpotensi

menyumbang kenaikan PDRB secara signifikan, yaitu lapangan usaha pertanian, perikanan, industri (termasuk UMKM) dan perdagangan. Potensi lainnya yaitu sektor pariwisata yang menjadi penggerak lapangan usaha lainnya serta sektor teknologi informasi. Penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Demak sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kecamatan Bonang sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Bonang memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Bonang di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonang terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Tujuannya adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar

pelayanan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Bonang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Bonang. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Bonang untuk periode 2021-2026. Sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Terkait isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, beberapa program/kegiatan yang mendukung dihubungkan dengan faktor-faktor pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal. Hal ini perlu didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan ketersediaan baik jumlah maupun kualitas ASN serta sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa didukung melalui program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
2. Pembangunan infrastruktur lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata. Hal ini perlu didukung dengan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Beberapa kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes, selanjutnya diusulkan pada Musrenbang tingkat kabupaten / provinsi / nasional dalam penyampaian aspirasi kebutuhan pembangunan yang ada di masyarakat

3. Potensi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan belum terkelola secara optimal. Hal ini perlu didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan melalui pelatihan / peningkatan kapasitas pelaku UMKM
4. Potensi bencana alam, non alam dan konflik sosial yang dihadapi masyarakat ditunjang dengan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum melalui sub kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan serta sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui kegiatan FKUU
5. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang belum merata didukung oleh program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

TABEL 3.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET RENSTRA OPD

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi 2023	TARGET		
				RPJMD pada tahun 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,16	78	78	75,16
	Sasaran 1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase indikator sasaran perangkat daerah yang mencapai target	100	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Bonang		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	90,06	91	93,05	91
	Sasaran 1.Terwujudnya pelayanan publik ysng responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanj uti	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Demak, maka pada Tahun 2024 Kecamatan Bonang melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu awal renja 2024 adalah Rp. 2.810.667.000,00 kemudian ada penambahan anggaran gaji pada APBD 2024 sehingga pagu menjadi Rp. 2.898.051.769,00 kemudian pada RKPD Perubahan 2024 ini ada penurunan pagu Gaji sebesar Rp. 395.480.500,00, sehingga pagu kecamatan Bonang menjadi Rp. 2.415.186.500,00.

Untuk anggaran rutin kegiatan ada pergeseran anggaran dari sisa anggaran sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan kita alokasikan untuk sub kegiatan rutin seperti, pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya.

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN					2.810.667.000	2.898.051.769	2.415.186.500	(395.480.500)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	2.421.185.899	3.096.923.499	2.734.115.950	(395.480.500)	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	9 Dokume	9 Dokume	9 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2.070.667.000	2.158.051.769	1.675.186.500	(395.480.000)	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.975.629.769	1.975.629.769	1.492.764.500	(395.480.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	182.422.000	182.422.000	182.422.000	-	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	100 persen	140.075.000	140.075.000	111.988.000	(28.087.000)	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	18 Paket	15 Paket	16.500.000	16.500.000	10.500.000	(6.000.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	22 Orang	22 Orang	73.575.000	73.575.000	51.448.000	(22.087.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	70 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	100 persen	94.558.000	94.558.000	94.558.000	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.580.000	47.580.000	47.580.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.678.000	4.678.000	4.678.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	67.500.000	67.500.000	67.500.000	-	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	42 unit	42 unit	42 unit	60.672.000	60.672.000	88.759.000	28.087.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.115.000	10.115.000	13.115.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	31.237.000	31.237.000	33.737.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	10.000.000	10.000.000	12.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0	0	14.214.400	14.214.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.320.000	7.320.000	13.692.600	6.372.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	100 %	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	21 Lembaga Kemsyraka	21 Lembaga Kemsyraka	21 Lembaga Kemsyraka	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	21 Lembaga	21 Lembaga	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	100 %	100 %	100 %	221.195.000	221.195.000	221.195.000	-	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	211.195.000	211.195.000	211.195.000	-	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	136.195.000	136.195.000	136.195.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	70 Orang	70 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL										2.810.667.000	2.898.051.769	2.415.186.500	(395.480.500)	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Bonang. Rencana kerja (Renja) ini nantinya sebagai rencana awal bagi OPD Kecamatan Bonang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan oleh perangkat daerah terkait hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencapai capaian kinerja program yaitu jumlah pegawai struktural yang belum terisi karena mutasi dan pensiun sehingga penyelesaian pekerjaan belum optimal, besaran pagu gaji PNS yang masih kurang jika diasumsikan ada pengisian pejabat struktural yang kosong / PNS baru pada tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah serentak yang menjadi salah satu fokus monitoring kegiatan di kecamatan dan juga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakibatkan beberapa perubahan terkait Pemerintahan Desa

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Bonang dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2024 merupakan rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Bonang.

Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berpedoman pada:

1. Dokumen RPJMD Kab. Demak Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 Kecamatan Bonang yang menjadi Acuan penyusunan tujuan, Sasaran, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Lokasi kegiatan serta Perkiraan maju.
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program & Kegiatan Periode Sebelumnya guna perumusan kegiatan, alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Bonang.
3. Usulan Program serta Kegiatan Dari Masyarakat dalam perumusan kegiatan dalam rancangan Renja (Rencana Kerja) guna mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas

Berdasarkan pedoman diatas maka Renja Kecamatan Bonang Tahun 2024 disusun dalam rangka dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bonang. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Kecamatan Bonang Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Kecamatan Bonang Tahun 2024 dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2024 dan menjadi acuan bagi sekretariat, dan seksi-seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
3. Selama pelaksanaan Renja dimaksud, harus dilakukan pengendalian, yaitu monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor keberhasilan maupun faktor penghambat apabila program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.
4. Renja 2024 akan dilakukan perubahan dan penyesuaian prioritas kebutuhan dan anggaran sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Renja tahun 2024 yang telah ditetapkan (definitif).

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam satu tahun anggaran 2024 dengan mengacu kepada RKPD tahun 2024. Pelaksanaan dokumen Renja tahunan merupakan bagian dari pencapaian target kinerja yang dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini. Rencana Kerja Kecamatan Bonang ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan sasaran Renstra yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, maka Kecamatan Bonang diharapkan untuk dapat :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas sumber daya yang ada di wilayah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja;
2. Selalu berusaha meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik;
3. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
4. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas

dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;

5. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;
6. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan;
7. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Tahun 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Lampiran 1

*PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH*

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7				UNSUB KEWILAYAHAN				7				UNSUB KEWILAYAHAN					
7	0 1			KECAMATAN				7	0 1			KECAMATAN					
7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7	0 1	0 1	20 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7	0 1	0 1	1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
7	0 1	0 1	20 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	7	0 1	0 1	1. 01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
				Daerah	Daerah	DokumenDaerah								Daerah			
7 1	0 1	0 1	20 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7	0 1	0 1	1. 01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
7 1	0 1	0 1	20 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	7	0 1	0 1	1. 01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
7 1	0 1	0 1	20 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	7	0 1	0 1	1. 01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
				Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD							Realisasi Kinerja SKPD					
7 1	0 1	0 1	20 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7 1	0 1	0 1	1. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7 1	0 1	0 1	20 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	7 1	0 1	0 1	1. 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
7 1	0 1	0 1	20 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7 1	0 1	0 1	1. 02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
7 1	0 1	0 1	20 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7 1	0 1	0 1	1. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7 1	0 1	0 1	20 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	7 1	0 1	0 1	1. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
7 1	0 1	0 1	20 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	7 1	0 1	0 1	1. 05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
						dan Pelatihan								dan Pelatihan			
7 1	0 1	0 1	20 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	7	0 1	0 1	1. 05	0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUnda ngan	Orang
7 1	0 1	0 1	20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	0 1	0 1	1. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7 1	0 1	0 1	20 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	0 1	0 1	1. 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
7 1	0 1	0 1	20 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	0 1	0 1	1. 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
7 1	0 1	0 1	20 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	0 1	0 1	1. 06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7	0 1	0 1	20 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	0 1	0 1	1. 06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
7	0 1	0 1	20 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	7	0 1	0 1	1. 06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	
7	0 1	0 1	20 6	0 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	0 1	0 1	1. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	
7	0 1	0 1	20 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	0 1	0 1	1. 06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7 0 1	0 1	20 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7 0 1	0 1	1. 06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		
7 1	0 1	20 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7 0 1	0 1	1. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
7 1	0 1	20 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7 0 1	0 1	1. 07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		
7 1	0 1	20 7	0 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7 0 1	0 1	1. 07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		
7 1	0 1	20 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7 0 1	0 1	1. 07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		
7 1	0 1	20 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Unit	7 0 1	0 1	1. 07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Unit		

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
7 1	0 1	0 1	20 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0 1	0 1	1. 07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
7 1	0 1	0 1	20 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7	0 1	0 1	1. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7 1	0 1	0 1	20 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7	0 1	0 1	1. 08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
7 1	0 1	0 1	20 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	0 1	0 1	1. 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
7 1	0 1	0 1	20 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7 1	0 1	0 1	1. 09		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
7 1	0 1	0 1	20 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7 1	0 1	0 1	1. 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
7 1	0 1	0 1	20 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7 1	0 1	0 1	1. 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
7 1	0 1	0 1	20 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7 1	0 1	0 1	1. 09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
7 1	0 1	0 1	20 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan	Unit	7 1	0 1	0 1	1. 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
				Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara			
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	7	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	7	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	
7	01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	7	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggara an	persen	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
				DAN PELAYANAN PUBLIK		pemerintahan dan pelayanan publik yang baik						PELAYANAN PUBLIK					
7	0 1	0 2	2. 01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	0 1	0 2	2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
7	0 1	0 2	2. 01	0 1	Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	0 1	0 2	2. 01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
7	0 1	0 2	2. 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Laporan	7	0 1	0 2	2. 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
						kepada camat											
7 0 1	0 2	2. 04	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	7 0 1	0 2	2. 04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		
7 0 1	0 2	2. 04	0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	7 0 1	0 2	2. 04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		
7 0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	Persen	7 0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
7 0 1	0 3	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah lembaga kemasyarakata n yang berpartisipas i dalam kegiatan pemberdayaan desa	Lembaga Kemasyara katan	7 0 1	0 3	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
7 0 1	0 3	2. 01	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang	Lembaga Kemasyara katan	7 0 1	0 3	2. 01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang	Lembaga Kemasyar akatan		

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN			
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Perencanaan Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa	Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
7 0 1	0 3	2. 01	0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	7	0 1	0 3	2. 01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7 0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	persen	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7 0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban	laporan	7	0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						umum yang dilaksanakan										
7 0 1	0 4	2. 01	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7 0 1	0 4	2. 01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	
7 0 1	0 4	2. 01	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7 0 1	0 4	2. 01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	
7 0 1	0 4	2. 02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	laporan	7 0 1	0 4	2. 02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7 0 1	0 4	2. 02	0 1	Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	7 0 1	0 4	2. 02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		
7 0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggara an urusan pemerintahan yang dilaksanakan	persen	7 0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
7 0 1	0 5	2. 01		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan penyelenggara an urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	laporan	7 0 1	0 5	2. 01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
7 0 1	0 5	2. 01	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	7 0 1	0 5	2. 01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang		

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
				Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Laporan	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
				Undangan	Perundang- Undangan							Perundang- Undangan					
7 0 1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, Keuangan dan aset pemerintahan Desa	persen	7 0 1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7 0 1 6	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	7 0 1 6	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7 0 1 6	2. 01	0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7 0 1 6	2. 01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen				
7 0 1 6	2. 01	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	7 0 1 6	2. 01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen				

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
				Desa	Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa								Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
7	0 1	0 6	2. 01	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	0 1	0 6	2. 01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	0 1	0 6	2. 01	0 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	7	0 1	0 6	2. 01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	0 1	0 6	2. 01	0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	0 1	0 6	2. 01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen
7	0 1	0 6	2. 01	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Dokumen	7	0 1	0 6	2. 01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Dokumen

SEMULA								MENJADI							
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
			Kemasyarakatan	Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n						Lembaga Kemasyarakatan	Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n			